



**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

NOMOR : 168 /KPTUN.W2.TUN.1/HM1.1.1/2025

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

- Menimbang
- a. Bahwa transparansi dan pelayanan publik merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan Peradilan dibawahnya ;
  - b. Bahwa untuk memberikan pelayanan publik secara baik dan memberikan informasi secara transparansi, maka perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
  - c. Bahwa Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang namanya tercantum dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dimaksud ;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  - 4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
  - 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
  - 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik;
  - 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
  - 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik ;
  - 10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan ;
  - 11. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/SKB/MA/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Pelaksanaannya ;

12. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan ;
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan ;
14. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI ;
15. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu ;

**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA ;
- KESATU :** Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 416/KPTUN.W2.TUN.1/HM1.1.1/I/2024 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- KEDUA :** Menunjuk nama-nama yang terlampir dalam keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya ;
- SALINAN :** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Jakarta.**

**Pada Tanggal : 8 Januari 2025**



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA,**

**GENDEN PRATIWI**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
NOMOR : 168 /KPTUN.W2.TUN.1/HM1.1.1/1/2025  
TANGGAL : 8 JANUARI 2025

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN	
		DINAS	TIM
1	OENOEEN PRATIWI S.H., M.H.	KETUA	DEWAN PERTIMBANGAN
2	YARWAN, S.H., M.H.	WAKIL KETUA	
2	Dr. MUHAMMAD, S.H., M.H.	PANITERA	
3	GIRI WAHYU UTOMO, S.Kom.	SEKRETARIS	ATASAN PPID
4	Hj. ROMLAH, S.H., M.H.	PANITERA MUDA HUKUM	PPID
5	SRI HARTANTO, S.H., M.Kn.	PANITERA MUDA PERKARA	PPID PELAKSANA
6	IKA SALAHUDDIN, S.E.	KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN	
7	MILATUL KHANIFAH, S.H.	KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	
8	TIAS DESCARIASTY, S.H.	KASUBAG PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN	
9	PURWOYO, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN	PETUGAS LAYANAN INFORMASI

**KETUA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA,**

